

# KATA PENGANTAR

Sebagai salah satu bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Blitar dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih, berdaya guna, berhasil guna dan bertanggungjawab serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Blitar tahun 2016. Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan daerah yang telah direncanakan dan dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar Tahun 2016.



Melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini akan diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau kegagalan terhadap pelaksanaan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kabupaten Blitar Tahun 2016 sekaligus dapat dilihat juga seberapa besar tingkat capaian kinerja dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku pelaksana kegiatan.

LKjIP Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016 yang juga merupakan salah satu dokumen evaluasi kinerja bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif kepada pemerintah baik Pusat/Provinsi, Kabupaten/Kabupaten lain serta lebih penting lagi bagi pelaku – pelaku pembangunan di Kabupaten Blitar dalam melihat capaian keberhasilan sekaligus kendala/permasalahan yang dihadapi Kabupaten Blitar. Sehingga bagi Pemerintah Pusat atau Provinsi, dalam perumusan kebijakan strategis perencanaan pembangunan yang berkenaan dengan Kabupaten Blitar, kedepan dapat lebih tepat sasaran dan implementatif. Sementara bagi Kabupaten/Kabupaten lain melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Blitar Tahun 2016 ini, dapat dijadikan komparasi/ pembandingan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah masing-masing. Sedangkan bagi pelaku-pelaku pembangunan di Kabupaten Blitar, dapat mencermati kendala-kendala yang ada dalam penyelenggaraan program/ kegiatan selama ini,

mengetahui penyebab kegagalan suatu program/kegiatan dan merumuskan langkah– langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan di masa–masa datang.

Dengan memanjatkan rasa syukur dan mohon ridlo kepada Allah SWT, semoga segala upaya yang dilakukan segenap pelaku pembangunan di Kabupaten Blitar untuk Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing dapat tercapai.

Blitar, 30 Maret 2017

**BUPATI BLITAR**

**Drs. RIJANTO, MM**



# ***RINGKASAN EKSEKUTIF***

Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan pedoman penyusunan pelaporan kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016, mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2016 serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUAPBD) Kabupaten Blitar Tahun 2016 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Blitar.

Pelaksanaan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tersebut didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerjanya serta target yang ditentukan. Dalam RPJMD Kabupaten Blitar terdapat 11 sasaran strategis dan 21 indikator kinerja yang menjadi ukuran keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Blitar.

Dari 11 sasaran strategis dan 21 indikator kinerja tersebut pada tahun 2016 secara keseluruhan telah mencapai target, hanya terdapat 2 sasaran dengan 3 indikator kinerja yang belum berhasil melampaui target yang telah ditetapkan yaitu :

1. Sasaran menurunnya angka kemiskinan dengan indikator kinerja prosentase angka kemiskinan, peningkatan pendapatan per kapita dan prosentase tingkat pengangguran terbuka.
2. Sasaran meningkatnya cakupan layanan kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator indeks kesehatan.

Arah pembangunan pada periode 5 (lima) tahun pertama dalam RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016 – 2021, menjadi titik tolak dan landasan yang kuat untuk dapat melaksanakan janji kampanye kepala daerah terpilih yaitu ***Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing***.

Adapun makna visi tersebut adalah sebagai berikut :

- **Lebih Sejahtera**, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- **Maju**, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
- **Berdaya Saing**, dimaknai dengan terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

Visi Kabupaten Blitar di atas dijabarkan lebih lanjut dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Blitar yang terdiri dari aparaturnya pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat, yaitu:

1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat;
2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum;
3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM);
4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing;
6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan.

Capaian Kinerja Tahun 2016, adalah sebagai berikut :

Capaian kinerja tiap-tiap sasaran pada tahun 2016, terdapat dalam tabel sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)
1.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	99,7 %
		Pendapatan Per Kapita	98,26 %
		Tingkat pengangguran Terbuka	98,2 %
2.	Meningkatnya dan Kualitas Infrastruktur Cakupan Layanan	Predikat Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	100 %
3.	Terwujudnya Stabilitas Wilayah	Prosentase Penanganan Konflik (%)	100 %
		Prosentase Penegakan Perda (%)	86,31 %
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	103,5%
5.	Meningkatnya Cakupan Layanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	98,78 %
6.	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	100 %
		Peringkat Penilaian LPPD se-Jawa Timur	N/A
		Opini BPK	N/A
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	100 %
8.	Meningkatnya Produktifitas Usaha Masyarakat, Koperasi, UMKM Berbasis Pertanian	Kontribusi Sector Perdagangan Terhadap PDRB	101,58 %
		Kontribusi Sector Industry Terhadap PDRB	98,92 %

	dan Pariwisata	Kontribusi Sector Pertanian Terhadap PDRB	99,04 %
		Prosentase Peningkatan PAD dari Sector Pariwisata	91,2 %
9.	Meningkatnya Pelayanan Perijinan	Predikat Layanan IKM Layanan Perijinan	100 %
10.	Efektifnya Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan	Prosentase Ketaatan Terhadap RTRW (%)	100 %
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	100,25 %
11.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Prosentase Desa Tertinggal	100 %

Capaian kinerja keuangan/akuntabilitas keuangan tiap-tiap sasaran pada tahun 2016, terdapat dalam tabel sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	99,7 %	93 %	4,7
		Pendapatan Per Kapita	98,26 %	93 %	5,26
		Tingkat pengangguran Terbuka	98,2 %	93 %	5,26
2.	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur	Predikat Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	100 %	93 %	7
3.	Terwujudnya Stabilitas Wilayah	Prosentase Penanganan Konflik (%)	100 %	86,75 %	13,25
		Prosentase Penegakan	82 %	86,76 %	- 0.45

		Perda (%)			
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	103,5%	78,24 %	25,26
5.	Meningkatnya Cakupan Layanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	98,78 %	76,88 %	21.9
6.	Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	100 %	90,23 %	9,77
		Peringkat Penilaian LPPD se-Jawa Timur	N/A	90,16 %	N/A
		Opini BPK	N/A	90,1 %	N/A
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	100 %	89,69 %	10,31
8.	Meningkatnya Produktifitas Usaha Masyarakat, Koperasi, UMKM Berbasis Pertanian dan Pariwisata	Kontribusi Sector Perdagangan Terhadap PDRB	101,58 %	66,43 %	35.15
		Kontribusi Sector Industry Terhadap PDRB	98,92 %	66,43 %	32,49
		Kontribusi Sector Pertanian Terhadap PDRB	99,04 %	66,43 %	32,61
		Prosentase Peningkatan PAD dari Sector	91,2 %	66,44 %	24.76

		Pariwisata			
9.	Meningkatnya Pelayanan Perijinan	Predikat Layanan IKM LAYANAN Perijinan	100 %	66,43 %	33,57
10.	Efektifnya Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan	Prosentase Ketaatan Terhadap RTRW (%)	100 %	66,43 %	33,57
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	100,25 %	66,43 %	33,82
11.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Prosentase Desa Tertinggal	90 %	95,83 %	15,17

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1.    Kondisi Umum Kabupaten Blitar.....	1
1.2.    Isu Strategis Yang Dihadapi .....	10
1.3.    Visi dan Misi.....	11
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>13</b>
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>18</b>
3.1.    Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar 2016.....	19
3.3.    Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Akhir RPJMD RPJMD 2016 – 2021 .....	21
3.4.    Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016.....	42
3.5.    Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016 .....	30
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>43</b>
4.1.    Kesimpulan .....	43
4.2.    Langkah Perbaikan.....	44
<b>LAMPIRAN</b>	
1.    Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Blitar	
2.    Matrik RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016 – 2021	
3.    Matrik Pengukuran Kinerja Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Blitar	
4.    Pernyataan Telah Direview dari Inspektorat Daerah	
5.    Prestasi dan Penghargaan yang diterima Kabupaten BlitarP	



# Pendahuluan

---

## 1.1. KONDISI UMUM KABUPATEN BLITAR

Kabupaten Blitar yang secara geografis terletak antara 111<sup>0</sup>40'-112<sup>0</sup>10' Bujur Timur dan 7<sup>0</sup>58' – 8<sup>0</sup>9'5" Lintang Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang di sebelah utara, Kabupaten Malang di sebelah timur, Samudera Indonesia di sebelah selatan serta Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Kediri di sebelah barat. Letak yang cukup strategis tersebut menjadikan perkembangan salah satu kabupaten di bagian selatan Propinsi Jawa Timur ini layak diperhitungkan.

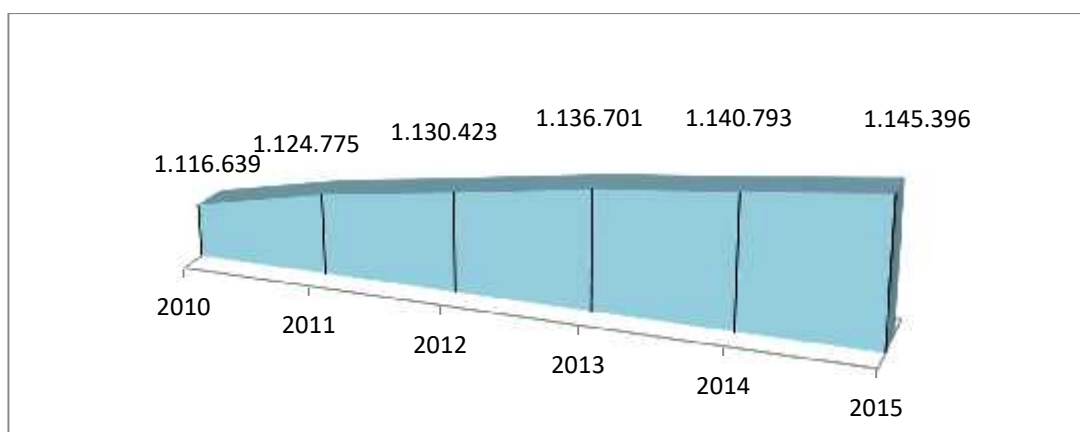
Dengan ketinggian ± 167 meter dan luas wilayah 1.588,79 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 22 kecamatan, 220 desa dan 28 kelurahan, kondisi alam Kabupaten Blitar sangat beragam. Keragaman tersebut ditunjukkan dengan adanya wilayah pegunungan, dataran rendah, daerah aliran sungai, maupun pesisir. Secara spesifik, kondisi topografi Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:

1. Bagian utara memiliki kemiringan yang bervariasi, yaitu 2% - 15%, 15% - 40% dan diatas 40%, dengan relief bergelombang hingga berbukit. Daerah ini merupakan bagian dari wilayah Gunung Kelud dan Gunung Butak.
2. Bagian tengah merupakan daerah yang relatif datar dengan kemiringan 0-20%. Sisi timur bagian ini agak bergelombang dengan kemiringan rata-rata 2-15%.
3. Bagian selatan merupakan wilayah yang sebagian besar berupa perbukitan dengan kemiringan 15% - 40%. Terdapat sebagian kecil dari daerah ini yang berada di sekitar Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas dengan kontur agak landai antara 0-20%.



**Gambar 1.1 Peta Kabupaten Blitar**

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blitar mencatat bahwa di tahun 2015 jumlah penduduk Kabupaten Blitar sebanyak 1.145.396 jiwa dengan laju pertumbuhan sebesar 0,51 persen sejak Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) lalu. Dengan luas wilayah 1.588,79 km<sup>2</sup> maka rata-rata kepadatan penduduk adalah sebesar 721 jiwa per km<sup>2</sup>.

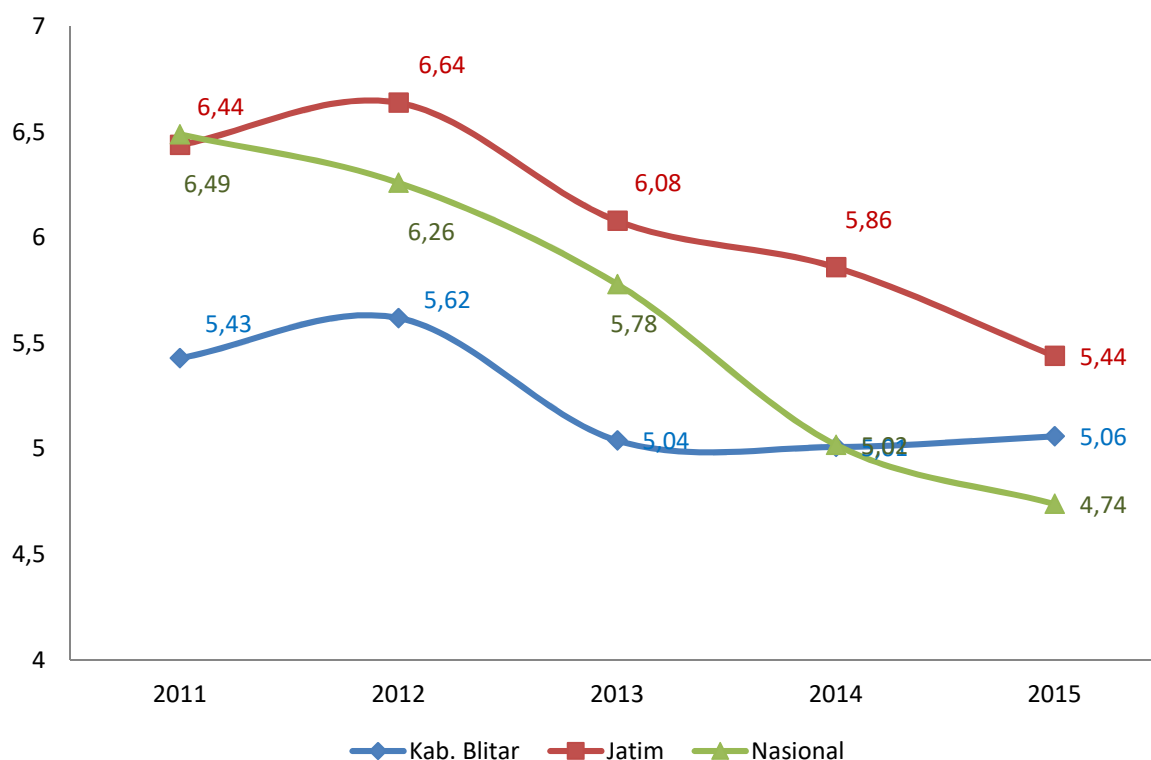


Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2016 (diolah)

\*)Data Tahun 2010 Hasil SP 2010

\*)Data Tahun 2011-2015 Hasil Proyeksi

**Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Blitar Tahun 2010-2015 (jiwa)**



Sumber: BPS Kab. Blitar, BPS Provinsi Jatim, BPS RI, 2016

**Gambar 1.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2011-2015**

Perekonomian Kabupaten Blitar tumbuh lebih cepat pada tahun 2015, meskipun pertumbuhannya tidak terlalu signifikan. Dari Gambar 1.3 dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Blitar mencapai 5,06%. Pertumbuhan sektoral PDRB Kabupaten Blitar secara rinci dapat dilihat pada berikut.

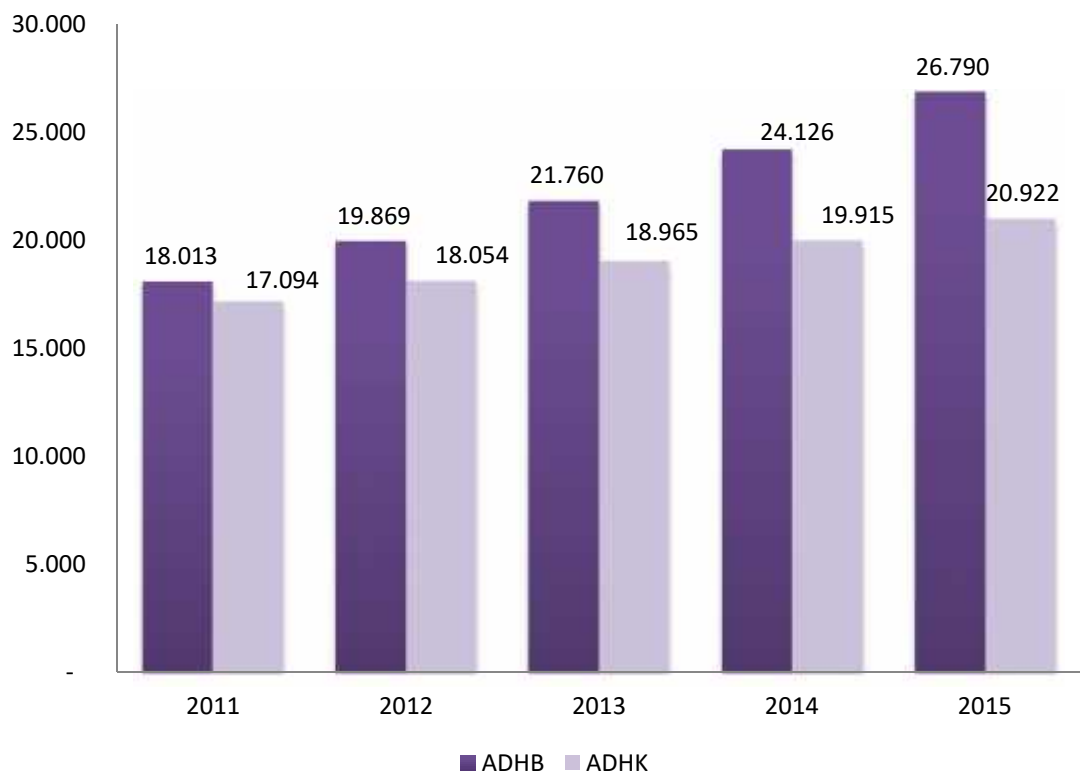
**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Sektoral PDRB Kabupaten Blitar**  
**ADHK 2010 Tahun 2011-2015 (%)**

Kategori	Lapangan Usaha/Industry	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>1. Sektor Tradable/Riil</b>		<b>3.58</b>	<b>3.91</b>	<b>3.19</b>	<b>4.04</b>	<b>4.53</b>
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.11	5.18	2.42	3.11	3.96

Kategori	Lapangan Usaha/Industry	2011	2012	2013	2014*	2015**
B	Pertambangan dan Penggalian	7.54	1.28	4.21	3.24	3.31
C	Industri Pengolahan	3.44	1.57	4.89	6.76	6.37
<b>2. Sektor Non Tradable/Finansial</b>		<b>7.56</b>	<b>7.51</b>	<b>7.03</b>	<b>6.01</b>	<b>5.59</b>
D	Pengadaan Listrik dan Gas	8.27	10.00	2.08	1.64	0.12
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	(0.32)	2.25	2.33	2.56	2.94
F	Konstruksi	5.07	6.48	8.42	6.21	3.10
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.83	9.33	7.29	6.22	6.85
H	Transportasi dan Pergudangan	5.05	4.31	5.74	7.36	6.19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8.05	12.09	4.19	5.96	5.95
J	Informasi dan Komunikasi	8.69	8.17	10.82	6.21	6.44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	28.26	13.83	8.13	6.70	4.34
L	Real Estat	6.83	4.80	5.27	6.76	5.83
M,N	Jasa Perusahaan	4.70	4.56	3.80	4.27	4.72
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial I Wajib	4.88	2.83	1.14	0.37	4.43
P	Jasa Pendidikan	4.96	5.04	5.85	8.51	6.16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	13.16	8.56	7.44	8.34	6.40
R,S,T,U	Jasa lainnya	7.03	4.88	4.01	5.05	4.51
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>		<b>5.43</b>	<b>5.62</b>	<b>5.04</b>	<b>5.01</b>	<b>5.06</b>

Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2016

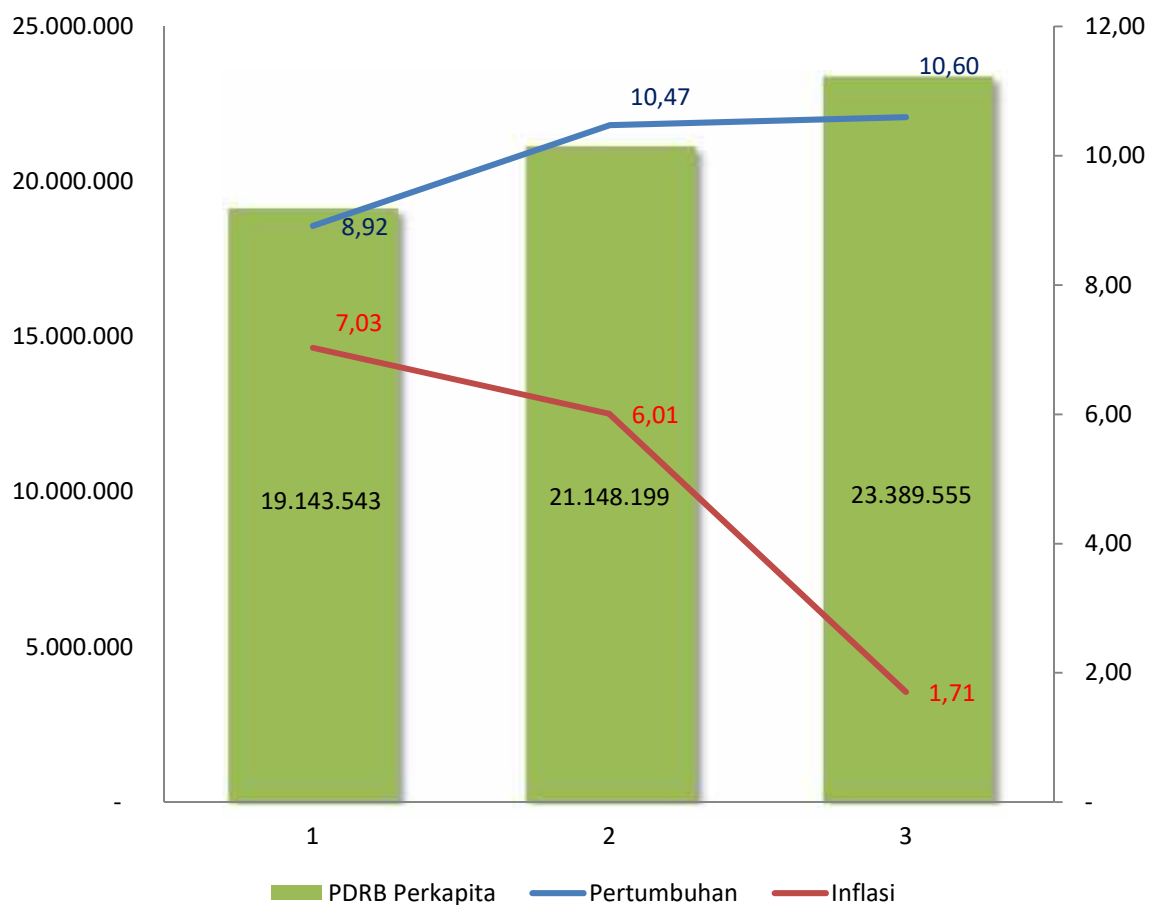
Sementara itu, secara nominal PDRB Kabupaten Blitar pada tahun 2015 yaitu sebesar 26,8 triliun rupiah (ADHB). Maknanya, di tahun tersebut seluruh barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk yang berdomisili di wilayah Kabupaten Blitar bernilai 26,8 triliun rupiah. Sedangkan jika ditinjau dari harga konstan 2010, PDRB yang dihasilkan berkisar 20,9 triliun rupiah.



Sumber: BPS Kabupaten Blitar, 2016 (diolah)

**Gambar 1.4 PDRB Kabupaten Blitar ADHB dan ADHK (milyar rupiah) Tahun 2011-2015**

Sementara itu, untuk melihat secara kasar tingkat kemakmuran rakyat suatu daerah dapat didekati dari PDRB per kapita. Selama kurun waktu 2013-2015, PDRB per kapita masyarakat Kabupaten Blitar terus mengalami peningkatan. PDRB per kapita pada tahun 2013 sebesar Rp.19,14 juta sedangkan pada tahun 2014 dan tahun 2015 masing-masing sebesar Rp.21,14 juta dan Rp. 23,39 juta. Pada tahun 2013, laju pertumbuhan PDRB per kapita sebesar 8,92%, tahun 2014 10,47% sedangkan pada tahun 2015 sebesar 10,60%.



Sumber: BPS Kab. Blitar, 2016 (diolah)

**Gambar 1.5 Nilai PDRB Perkapita dan Pertumbuhannya, serta Inflasi Kabupaten Blitar Tahun 2013-2015**

Dari gambar di atas, dapat dipastikan bahwa angka laju pertumbuhan PDRB Per Kapita, yang dalam hal ini didasarkan pada harga berlaku, jauh berada di atas angka laju inflasi. Hal tersebut menjelaskan bahwa secara umum masyarakat Kabupaten Blitar tidak mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan hidup karena angka inflasi jauh lebih kecil dibanding nilai pendapatan perkapita masyarakat yang diwakili oleh PDRB per kapita. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan daya beli masyarakat Kabupaten Blitar cukup tinggi, dan secara riil, masyarakat mampu memenuhi kebutuhan sehari-harinya.

Untuk mewujudkan negara yang bersih dan berwibawa (*Good Governance and Clean Government*) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, kepatuhan terhadap asas umum penyelenggaraan negara perlu ditegakkan. Sejalan dengan hal tersebut, dikeluarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016, mengacu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2016 serta Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Blitar Tahun 2016 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kabupaten Blitar. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Blitar menyajikan informasi kinerja yang terukur atas pencapaian sasaran dan realisasi pencapaian indikator sasaran RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021, disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator kinerja. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Blitar merupakan laporan atas kemajuan penyelenggaraan pemerintahan oleh Bupati dan Wakil Bupati Blitar yang telah dicapai serta sebagai evaluasi untuk peningkatan kinerja yang berkesinambungan periode selanjutnya.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, da unntuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah Kabupaten Blitar menetapkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Bupati dibantu oleh Wakil Bupati. Selain itu, Bupati dibantu pula oleh Sekretaris Daerah yang memimpin Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas dalam menyusun dan mengkoordinasikan kebijakan.

Sekretariat Daerah terdiri dari :

1. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, yang mengkoordinir :
  - a. Bagian Pemerintahan
  - b. Bagian Hukum
  - c. Bagian Kesra
2. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan, yang mengkoordinir :
  - a. Bagian Perekonomian dan Pembangunan
  - b. Bagian Layanan Pengadaan
3. Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum, yang mengkoordinir :
  - a. Bagian Organisasi
  - b. Bagian Umum
  - c. Bagian Humas dan Protokol
  - d. Bagian Perlengkapan

Dinas-dinas terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan
2. Dinas Sosial
3. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4. Dinas Kesehatan
5. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Dinas Perhubungan
8. Dinas Komunikasi dan Informatika
9. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
10. Dinas Tenaga Kerja
11. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

12. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
13. Dinas Lingkungan Hidup
14. Dinas Perpustakaan dan Arsip
15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
16. Dinas Pertanian dan Pangan
17. Dinas Peternakan dan Perikanan
18. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20. Satuan Polisi Pamong Praja

Badan-badan sebagai pelaksana unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah terdiri dari :

1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
4. Badan Pendapatan Daerah

Serta kecamatan yang terdiri dari 22 kecamatan dan 28 kelurahan yang merupakan bagian dari perangkat kecamatan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, tahun 2016 Kabupaten Blitar didukung oleh 11.310 sumber daya aparatur pemerintah yang terdiri dari :

- a. Jabatan Struktural yang terdiri dari Esselon II 36 orang, Esselon III 197 orang, Esselon IV 855 orang dan Esselon V 53 orang
- b. Jabatan Fungsional yang terdiri dari :
  - 1) Jabatan fungsional umum sejumlah 1.643 orang
  - 2) Jabatan fungsional pendidik sejumlah 7.232 orang
  - 3) Jabatan fungsional kesehatan sejumlah 822 orang
  - 4) Jabatan fungsional lain sejumlah 472 orang

## 1.2. ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI

Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan pembangunan di berbagai bidang yang ditujukan demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah Kabupaten Blitar diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan pemerataan pendidikan serta kesinambungan pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan baik kecepatan/daya tanggap, ketepatan, serta akurasi pelayanan kesehatan, pengembangan ekonomi kerakyatan (Gerakan Ekonomi Kreatif), penanganan kemiskinan, tuntutan pembangunan berwawasan lingkungan, penanaman yang kuat pada pemahaman nilai-nilai wawasan kebangsaan dan religiusitas, serta tata kelola pemerintahan yang baik guna mewujudkan pelayanan prima masyarakat.

Permasalahan Pemerintah Kabupaten Blitar serta kemungkinan permasalahan yang timbul di tahun-tahun selanjutnya dalam menghadapi peluang dan tantangan baik lokal maupun global perlu mendapat perhatian dalam rangka pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan yang disusun mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak permasalahan yang ada.

Adapun isu strategis berdasarkan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2016 - 2021 yaitu :

- 1. Daya saing kompetitif dalam bidang ekonomi;**
- 2. Ketersediaan infrastruktur yang memadai;**
- 3. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam ketertiban dan keamanan;**
- 4. Peningkatan sumber daya manusia (SDM);**
- 5. Pengembangan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;**
- 6. Pengembangan potensi pariwisata;**
- 7. Kerjasama konstruktif antara pemerintah dengan dunia usaha dan pemerintah dengan pemerintah;**
- 8. Penguatan dan pemberdayaan kelembagaan dan masyarakat desa.**

### 1.3 VISI DAN MISI

Berdasarkan kondisi Kabupaten Blitar dan tantangan yang dihadapi, serta mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki maupun amanat pembangunan yang tercantum dalam RPJP Kabupaten Blitar tahun 2006 - 2026, Visi Pemerintah Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016 - 2021 adalah : **“MENUJU KABUPATEN BLITAR LEBIH SEJAHTERA, MAJU DAN BERDAYA SAING”**

Adapun makna Visi tersebut adalah sebagai berikut :

- **Lebih Sejahtera**, berarti meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara lahir dan batin. Secara lahir adalah pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara baik, pengurangan angka kemiskinan, peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan kesempatan kerja, kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan. Peningkatan kesejahteraan secara batin diwujudkan dalam penciptaan suasana kehidupan yang religius, aman dan kondusif, serta adanya kebebasan dan kemudahan masyarakat dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- **Maju**, dimaknai dengan adanya perkembangan positif dalam setiap aspek kehidupan masyarakat terutama terkait dengan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia, tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
- **Berdaya Saing**, dimaknai dengan terwujudnya kemampuan masyarakat Kabupaten Blitar untuk memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetitif yang dimiliki sehingga mampu bersaing secara regional, nasional bahkan internasional.

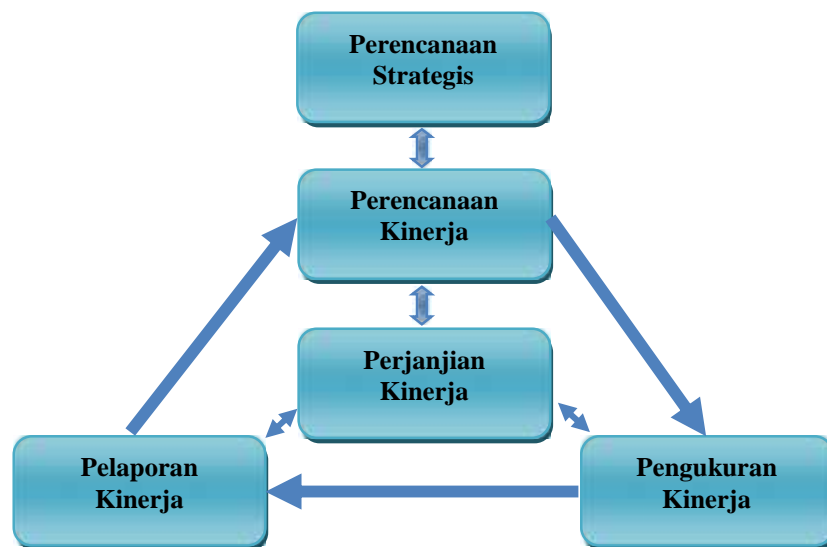
Visi Kabupaten Blitar di atas dijabarkan lebih lanjut dalam Misi yang akan menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Blitar yang terdiri dari aparatur pemerintahan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, organisasi politik, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat, yaitu :

- 1. Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat;**
- 2. Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilai keagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum;**
- 3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia (SDM);**
- 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;**
- 5. Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing;**
- 6. Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan.**

# 2

## Perencanaan Kinerja

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.



**Gambar 2.1 Hubungan Antara Perencanaan Strategis dan Perencanaan Kinerja**

Sesuai skema di atas, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kabupaten Blitar Tahun 2016 mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2016–2021. Pengukuran tahun pertama dari RPJMD Kabupaten Blitar

Tahun 2016–2021. LKjIP tahun 2016 ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran.

RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2016 – 2021 digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan karena telah menjadi kontrak sosial dan politik yang harus dilaksanakan oleh semua unsur pemangku kepentingan Kabupaten Blitar dalam mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan. Selanjutnya RPJMD tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Blitar dan perangkat kerja daerah dalam dokumen perencanaan tahunan yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dengan semangat dan komitmen untuk menghasilkan kinerja yang optimal serta mewujudkan *good and clean governance*, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blitar, serta tujuan dan sasaran pembangunan yang telah dirumuskan dalam Perjanjian Kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Blitar adalah pernyataan komitmen pimpinan sebagai penerima amanah untuk mewujudkan janji mencapai kinerja tertentu yang telah disepakati bersama. Perjanjian kinerja tahun 2016 juga merupakan penjabaran dari sasaran dan program tahun ke-1 yang telah ditetapkan dalam RPJMD yang dapat diuraikan sebagai berikut :

**MISI 1 : MENINGKATKAN TARAF KEHIDUPAN MASYARAKAT**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target</b>
Meningkatkan derajat ekonomi masyarakat	<b>Menurunnya angka kemiskinan</b>	Angka Kemiskinan (%)	10 – 10,22
		Pendapatan per kapita (juta rupiah)	25,97
		Tingkat pengangguran terbuka (%)	2,78
	<b>Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur</b>	Predikat indeks kepuasan layanan infrastruktur	Baik

**MISI 2 : MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT BERLANDASKAN NILAI-NIALI KEAGAMAAN (RELIGIUS), KEARIFAN LOKAL DAN HUKUM**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target</b>
Menciptakan suasana kehidupan yang aman dan kondusif	<b>Terwujudnya stabilitas wilayah</b>	Prosentase penanganan konflik (%)	100
		Prosentase penegakan PERDA (%)	95

**MISI 3 : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
Mewujudkan SDM yang berdaya saing	Meningkatnya kualitas pelayanan pendidikan masyarakat	Indeks Pendidikan	0,57
	Meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	0,82

**MISI 4 : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
Mewujudkan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Nilai SAKIP	CC
		Peringkat penilaian LPPD se-Jawa Timur	30 Besar
		Opini BPK	WDP
	Meningkatnya kualitas pelayanan public	Predikat survey kepuasan masyarakat terhadap layanan public	Baik

**MISI 5 : MENINGKATKAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT DAN USAHA EKONOMI MASYARAKAT YANG MEMILIKI DAYA SAING**

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
Mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan penguatan system inovasi daerah (SIDa) dan memperhatikan daya dukung lingkungan	Meningkatnya produktifitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata	Kontribusi sector perdagangan terhadap PDRB (%)	17,08
		Kontribusi sector industry terhadap PDRB (%)	13,04
		Kontribusi sector pertanian terhadap PDRB (%)	35,76
		Prosentase peningkatan PAD dari	1,25

		sector pariwisata (%)	
	<b>Meningkatnya pelayanan perijinan</b>	Predikat IKM layanan perijinan	Baik
	<b>Efektifnya pemanfaatan ruang dan lingkungan</b>	Prosentase ketaatan terhadap RTRW (%)	77
		Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	66,7

#### **MISI 6 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN BERBASIS DESA DAN KAWASAN PERDESAAN**

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Target</b>
Meningkatkan kemandirian desa	<b>Meningkatnya kualitas pembangunan desa</b>	Prosentase desa tertinggal (%)	20,45

Dimana untuk mewujudkan terlaksananya Perjanjian Kinerja tersebut didukung :

Program : 170 Program

Kegiatan : 2.741 Kegiatan

Dan untuk jelasnya Perjanjian Kinerja Sebagaimana Terlampir

# 3

## Akuntabilitas Kinerja

### Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016

Laporan kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 maupun RKPD Tahun 2016. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan demi mewujudkan misi dan visi pemerintah.

Pengukuran kinerja yang dilakukan masih didasarkan pada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja makro diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis. Penghitungan capaian kinerja perlu memperhatikan karakteristik indikator kinerja yang memiliki kondisi:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik

$$\text{Persentase capaian} = \frac{R}{T} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja

$$\text{Persentase capaian} = \frac{T - (R - T)}{T} \times 100\%$$

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

<b>Lebih dari 100</b>	<b>:</b>	<b>Sangat Berhasil</b>
<b>75 s/d &lt;100</b>	<b>:</b>	<b>Berhasil</b>
<b>55 s/d &lt;75</b>	<b>:</b>	<b>Cukup Berhasil</b>
<b>0 s/d &lt; 55</b>	<b>:</b>	<b>Kurang Berhasil</b>

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

### 3.1. Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar 2016

**Tabel 3.1.1. Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indicator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	10-10,22	N/A	N/A
	Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)	25,97	25,52	98,26
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,78	2,73	98,2
Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur	Predikat Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Baik	Baik	100

Terwujudnya Stabilitas Wilayah	Prosentase Penanganan Konflik (%)	100	100	100
	Prosentase Penegakan Perda (%)	95	82	86,31
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	0,57	0,59	103,5
Meningkatnya Cakupan Layanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,82	0,81	98,78
Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	CC	CC	100
	Peringkat Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	30 Besar	N/A	N/A
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WDP	N/A	N/A
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Baik	Baik	100
Meningkatnya Produktifitas Usaha Masyarakat, Koperasi, UMKM Berbasis Pertanian dan Pariwisata	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	17,08	17,35 **)	101,58
	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	13,04	12,90 **)	98,92
	Kontribusi Sektor Pertanian	35,75	35,41 **)	99,04

	Terhadap PDRB (%)			
	Prosentase Peningkatan PAD dari Sektor Pariwisata (%)	1,25	1,14	91,2
Meningkatnya Pelayanan Perijinan	Predikat IKM Layanan Perijinan	Baik	Baik	100 %
Efektifnya Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan	Prosentase Ketaatan Terhadap RTRW (%)	100	100	100 %
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,7	66,87	100,25 %
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Prosentase Desa Tertinggal (%)	20,45	22,7	111 %

**Tabel 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Akhir RPJMD 2016 – 2021**

Sasaran Strategis	Indicator Kinerja	Target Akhir RPJMD	Realisasi Tahun 2016	Tingkat Kemajuan (%)
Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	≤ 9,6	N/A	N/A
	Pendapatan per Kapita (Jutaan Rupiah)	40,35	25,52	63,24
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,70	2,73	98,9
Meningkatnya Capaian dan Kualitas Layanan Infrastruktur	Predikat Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Baik	Baik	100
Terwujudnya Stabilitas Wilayah	Prosentase Penanganan Konflik (%)	100	100	100
	Prosentase Penegakan Perda (%)	100	82	82

Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	0,60	0,59	98,33
Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,84	0,81	96,42
Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Serta akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai Sakip	A	CC	40
	Peringkat Penilaian LPPD se-Jawa Timur	10 Besar	N/A	N/A
	Opini BPK	WTP	N/A	N/A
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Sangat Baik	Baik	Baik
Meningkatnya Produktifitas Usaha Masyarakat, Koperasi, UMKM Berbasis Pertanian dan Pariwisata	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	19,51	17,35	88,98
	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	15,36	12,90	83,98
	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)	35,21	35,41	100,56
	Prosentase Peningkatan PAD dari Sektor Pariwisata (%)	1,7	1,14	67
Meningkatnya Pelayanan Perijinan	Predikat IKM Layanan Perijinan	Baik	Baik	100
Efektifnya Pemanfaatan	Prosentase Ketaatan	85	100	117,64

Ruang dan Lingkungan	Terhadap RTRW (%)			
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	71	66,87	94,18
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Prosentase Desa Tertinggal (%)	0	22,7	18

### 3.2. Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016

Tabel 3.2.1 Alokasi Per Sasaran Pembangunan

No	Sasaran Strategis	Indicator Kinerja	Anggaran (Rp.)	% anggaran dari APBD
1.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	194.590.877.161	14,83 %
		Pendapatan Per Kapita	170.267.017.516	12,98 %
		Tingkat pengangguran Terbuka	91.214.473.669	6,95 %
2.	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur	Predikat Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	152.024122.782	11,59 %
3.	Terwujudnya Stabilitas Wilayah	Prosentase Penanganan Konflik	4.221.053.200	0,32 %
		Prosentase Penegakan Perda	6.331.579.800	0,48 %
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	116.877.793.198	8,91 %
5.	Meningkatnya Cakupan Layanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	97.320.062.544	7,42 %
6.	Meningkatnya Efektifitas dan	Nilai SAKIP	77.793.286.335	5,93 %

	Efisiensi Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah			
		Peringkat Penilaian LPPD se-Jawa Timur	90.060.150.960	6,86 %
		Opini BPK	86.540.597.679	6,59 %
7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	102.223.871.870	7,79 %
8.	Meningkatnya Produktifitas Usaha Masyarakat, Koperasi, UMKM Berbasis Pertanian dan Pariwisata	Kontribusi Sector Perdagangan Terhadap PDRB	8.538.623.607	0,65 %
		Kontribusi Sector Industry Terhadap PDRB	5.568.667.570	0,42 %
		Kontribusi Sector Pertanian Terhadap PDRB	12.993.557.663	0,99 %
		Prosentase Peningkatan PAD dari Sector Pariwisata	10.023.601.626	0,76 %
9.	Meningkatnya Pelayanan Perijinan	Predikat Layanan IKM Layanan Perijinan	28.874.572.585	2,20 %
10.	Efektifnya Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan	Prosentase Ketaatan Terhadap RTRW	12.374.816.822	0,94 %
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	4.124.938.941	0,31 %
11.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Prosentase Desa Tertinggal	39.272.586.152	2,99 %

Tabel 3.2.2. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2016

Sasaran Strategis	Indicator Kinerja	Kinerja			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	10–10,22 %	N/A	N/A	194.590.877.161	181.104.256.463	93
	Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)	25,97	25,52	98,26	170.267.017.516	158.466.224.405	93
	Tingkat pengangguran Terbuka (%)	2,78	2,73	98,2	91.214.473.669	84.892.620.217	93
Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur	Predikat Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Baik	Baik	100	152.024122.782	141.487.700.362	93
Terwujudnya Stabilitas Wilayah	Prosentase Penanganan Konflik (%)	100	100	100	4.221.053.200	3.662.146.468	86,75
	Prosentase Penegakan Perda (%)	95	82	86,31	6.331.579.800	5.493.219.702	86,76

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	0,57	0,59	103,5	116.877.793.198	91.447.165.350	78,24
Meningkatnya Cakupan Layanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,82	0,81	98,78	97.320.062.544	74.820.408.013	76,88
Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	CC	CC	100	77.793.286.335	70.193.149.400	90,23
	Peringkat Penilaian LPPD se-Jawa Timur	30 Besar	N/A	N/A	90.060.150.960	81.196.495.086	90,16
	Opini BPK	WDP	N/A	N/A	86.540.597.679	77.980.497.264	90,1
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	Baik	Baik	100	102.223.871.870	91.694.547.388	89,69
Meningkatnya Produktifitas Usaha Masyarakat,	Kontribusi Sector Perdagangan Terhadap PDRB	17,08	17,35	101,58	8.538.623.607	5.672.827.748	66,43

Koperasi, UMKM Berbasis Pertanian dan Pariwisata	Kontribusi Sector Industry Terhadap PDRB	13,04	12,90	98,92	5.568.667.570	3.699.670.271	66,43
	Kontribusi Sector Pertanian Terhadap PDRB	35,75	35,41	99,04	12.993.557.663	8.632.563.965	66,43
	Prosentase Peningkatan PAD dari Sector Pariwisata	1,25	1,14	91,2	10.023.601.626	6.659.406.487	66,44
Meningkatnya Pelayanan Perijinan	Predikat Layanan IKM Layanan Perijinan	Baik	Baik	100	28.874.572.585	19.183.475.478	66,43
Efektifnya Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan	Prosentase Ketaatan Terhadap RTRW (%)	100	100	100	12.374.816.822	8.221.489.490	66,43
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,7	66,87	100,25	4.124.938.941	2.740.496.497	66,43
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Prosentase Desa Tertinggal	20,45	22,7	90	39.272.586.152	37.635.851.567	95,83

**Tabel 3.2.3 Efisiensi Penggunaan Anggaran**

No	Sasaran	Indicator Sasaran	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan	N/A	93	N/A
		Pendapatan Per Kapita	98,26	93	5,26
		Tingkat pengangguran Terbuka	98,2	93	5,26
2.	Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur	Predikat Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	100	93	7
3.	Terwujudnya Stabilitas Wilayah	Prosentase Penanganan Konflik (%)	100	86,75	13,25
		Prosentase Penegakan Perda (%)	86,31	86,76	- 0.45
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	103,5	78,24	25,26
5.	Meningkatnya Cakupan Layanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	98,78	76,88	21.9
6.	Meningkatnya Efektivitas dan Efisiensi Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	100	90,23	9,77
		Peringkat Penilaian LPPD se-Jawa Timur	N/A	90,16	N/A
		Opini BPK	N/A	90,1	N/A

7.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik	100	89,69	10,31
8.	Meningkatnya Produktifitas Usaha Masyarakat, Koperasi, UMKM Berbasis Pertanian dan Pariwisata	Kontribusi Sector Perdagangan Terhadap PDRB	101,58	66,43	35,15
		Kontribusi Sector Industry Terhadap PDRB	98,92	66,43	32,49
		Kontribusi Sector Pertanian Terhadap PDRB	99,04	66,43	32,61
		Prosentase Peningkatan PAD dari Sector Pariwisata	91,2	66,44	24,76
9.	Meningkatnya Pelayanan Perijinan	Predikat Layanan IKM LAYanan Perijinan	100	66,43	33,57
10.	Efektifnya Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan	Prosentase Ketaatan Terhadap RTRW (%)	100	66,43	33,57
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	100,25	66,43	33,82
11.	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Prosentase Desa Tertinggal	111	95,83	15,17

### 3.3. Analisis Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2016

Analisis dan evaluasi dilakukan guna penyempurnaan / perbaikan perencanaan dan penanganannya atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Analisis atas pencapaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2016 merupakan analisis terhadap komitmen Bupati guna mencapai target kinerja sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar. Penjabaran analisis dan evaluasi capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

➤ **Misi I : Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat**

**Tujuan : Meningkatkan Derajat Ekonomi Masyarakat**

**Tabel 3.3.1. Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Menurunnya Angka Kemiskinan	Angka Kemiskinan (%)	10-10,22	N/A	N/A
	Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)	25,97	25,52	98,26
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,78	2,73	98,2
Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur	Predikat Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Baik	Baik	100

Dalam tabel 3.1. untuk angka kemiskinan belum dapat dirilis, hal ini disebabkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Blitar tahun 2016 belum dirilis oleh BPS pusat sebagai pihak yang berwenang merilis. Sedangkan untuk pendapatan per kapita diukur dengan membagi PDRB ADHB dengan jumlah penduduk. Pada tahun 2016, PDRB per kapita masyarakat sebesar 25,2 juta rupiah, lebih rendah dibanding target namun meningkat dibanding tahun 2015 (23,39 juta rupiah). Namun demikian tren pendapatan per kapita selama 2014-2016 terus meningkat yaitu 21, 16 juta rupiah (2014), 23,38 juta rupiah (2015)

dan 25,52 juta rupiah (2016). Meskipun tidak dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara mutlak, namun PDRB per kapita dapat menjadi indikator awal tingkat kemakmuran suatu wilayah. Apabila pertumbuhan PDRB per kapita tahun 2016 sebesar 9,17 persen dibandingkan dengan laju inflasi yaitu 1,3 persen maka dapat diindikasikan bahwa daya beli masyarakat terjaga baik.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja, dan pada waktu yang bersamaan mereka tidak bekerja (jobless). Pada tahun 2015 TPT di Kabupaten Blitar sebesar 2,79 persen sedangkan pada tahun 2016 turun menjadi sebesar 2,73 persen.

Sasaran Predikat Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur diukur dengan indikator Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur. Adapun predikat kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur adalah baik, dimana hal ini selaras dengan kinerja indikator pelayanan umum menyangkut infrastruktur jalan, drainase dan saluran irigasi sudah mencapai target. Panjang jalan dengan kondisi baik (kecepatan pengendara bisa mencapai >40 km/jam) pada tahun 2016 mencapai 554 kilometer atau meningkat 5,4 persen dibanding tahun sebelumnya. Drainase yang dalam kondisi baik mencapai 85,65 km atau meningkat 71,3 persen. Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase mencapai 100 km atau meningkat 42,85 persen dan luas irigasi dalam kondisi baik mencapai 18.351 hektare (meningkat 1,95 persen).

Kebijakan yang diambil untuk mendukung sasaran Meningkatkan Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur antara lain :

- a. Kebijakan pembangunan rumah layak huni, pada tahun 2016 terealisasi 33 rumah.
- b. Kebijakan pemerataan akses air bersih, terutama di wilayah Blitar selatan.
- c. Kebijakan pengembangan pusat pemerintahan di Kecamatan Kanigoro.
- d. Kebijakan pengembangan akses destinasi wisata Kabupaten Blitar.

Selain itu juga dengan mengoptimalkan Program Kerja diantaranya; Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial, Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial, Program Peningkatan Kesempatan Kerja, Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya, Program Pengembangan

Infrastruktur Perdesaan, Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Serta Program dan Kegiatan lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam pencapaian sasaran.

Dari uraian dan capaian kinerja tahun 2016 atas sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan dan Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur dalam rangka mewujudkan Misi Meningkatkan Taraf Kehidupan Masyarakat berhasil dengan **BAIK**.

➤ **Misi II : Memantapkan Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan (Religius), Kearifan Lokal dan Hukum**

**Tujuan : Menciptakan Suasana Kehidupan Yang Aman dan Kondusif**

**Tabel 3.3.2. Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indicator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Terwujudnya Stabilitas Wilayah	Prosentase Penanganan Konflik (%)	100	100	100
	Prosentase Penegakan Perda (%)	95	82	86,31

Kondisi di Kabupaten Blitar cukup kondusif selama tahun 2016, hal ini terlihat pada tabel diatas dimana konflik-konflik yang muncul dapat ditangani dengan baik oleh Badan Kesbangpol melalui koordinasi dengan SKPD maupun instansi vertikal terkait. Dari jumlah konflik yang muncul sepanjang tahun (20 kasus) seluruhnya dapat tertangani dengan baik melalui mediasi.

Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Pada tahun 2016 terdapat 11 peraturan daerah dan 6 peraturan kepala daerah yang harus ditegakkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Dari 99 kasus pelanggaran perda, 81 kasus telah diselesaikan dan ada 19 kasus yang belum terselesaikan. Pelanggaran peraturan daerah dan peraturan bupati yang belum terselesaikan yaitu penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perijinan Usaha Peternakan dan Pendaftaran Peternakan Rakyat sebanyak 3 kasus; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan dan Penataan Menara Telekomunikasi sebanyak 2 kasus; Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan sejumlah 4 kasus; dan Peraturan Bupati

Nomor 42 Tahun 2013 tentang pedoman Pelaksanaan Retribusi izin Gangguan (HO) sebanyak 9 kasus. Kasus-kasus tersebut masih sedang tahap mediasi (tindakan non-yustisi).

Kebijakan yang diambil untuk mendukung sasaran Terwujudnya Stabilitas Wilayah antara lain :

- a. Membentuk Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).
- b. Membentuk Dewan Penasehat Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
- c. Membentuk Team Terpadu Pananganan Konflik.
- d. Kebijakan tertib bangunan.

Selain itu juga dengan mengoptimalkan Program Kerja diantaranya Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan, Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat). Serta Program dan Kegiatan lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam pencapaian sasaran.

Dari uraian dan capaian kinerja tahun 2016 atas sasaran terwujudnya stabilitas wilayah dalam rangka mewujudkan misi Memantapkan Kehidupan Masyarakat Berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan (religius), Kearifan Lokal dan Hukum dapat disimpulkan berhasil dengan **BAIK**.

➤ **Misi III : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

**Tujuan : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing**

**Tabel 3.3.3. Pencapaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indicator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat	Indeks Pendidikan	0,57	0,59	103,5
Meningkatnya Cakupan Layanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,82	0,81	98,78

Sasaran Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan Masyarakat diukur melalui Indeks Pendidikan. Data Indeks Pendidikan Tahun 2016 sebesar 0,59. Adapun capaian kinerja urusan pendidikan tahun 2016 selaras dengan indeks pendidikan , diantaranya: Angka Melek Huruf mencapai 98 persen; Rata-rata Lama Sekolah meningkat dari 7,2 tahun menjadi 7,3 tahun; Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMP/MTs dan Paket B meningkat dari 108 ke 109 dan Angka Partisipasi Kasar Jenjang SMA/SMK/MA meningkat dari 41 ke 42; Meningkatnya persentase guru SD/SDLB berkualifikasi S1/D4 dari 82 persen menjadi 84 persen; Persentase Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik melebihi target dan naik dari 90 persen (2015) menjadi 91 persen (2016),

Sasaran Meningkatnya Cakupan Layanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat diukur melalui Indeks Kesehatan. Data Indeks Kesehatan Tahun 2016 sebesar 0,81. Adapun capaian kinerja urusan kesehatan tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan dan RSUD Ngudi Waluyo Wlingi, diantaranya: Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin meningkat dari 9,77 persen (2015) menjadi 20,10 persen (2016); Capaian Rasio Posyandu per satuan balita tahun 2016 adalah 1:50 artinya 1 posyandu melayani 50 balita. Bila dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 1:61, capaian rasio posyandu mengalami peningkatan yang artinya adalah pelayanan Posyandu lebih maksimal; Capaian cakupan desa UCI tahun 2016 adalah 96,37%, melebihi target yang ditetapkan yaitu 91,5% dan meningkat dari capaian tahun 2015 (92,34%). Capaian Rasio Posyandu per satuan balita tahun 2016 adalah 1:50 artinya 1 posyandu melayani 50 balita, dimana capaian tahun 2015 sebesar 1:61; Prevalensi Balita Gizi Buruk mengalami penurunan yaitu dari 1,2 persen menjadi 0,1 persen di tahun 2016.

Kebijakan yang diambil untuk mendukung sasaran Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat antara lain :

- a. Gerakan Penyelamatan Ibu Maternal dan bayi baru lahir
- b. Kebijakan Kabupaten Blitar ODF (Open Defecation Free)
- c. Kebijakan bantuan pelayanan kesehatan masyarakat miskin
- d. Pendidikan berkarakter wawasan Kebangsaan, Budi Pekerti dan Praktek keagamaan
- e. Zonasi Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan

Selain itu juga dengan mengoptimalkan Program Kerja diantaranya; Program Wajib Belajar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, Program Pendidikan Non Formal,

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan, Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit BLUD Ngudi Waluyo Wlingi dan Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya. Serta Program dan Kegiatan lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam pencapaian sasaran.

Dari uraian serta capaian kinerja tahun 2016 atas sasaran meningkatnya kualitas layanan pendidikan masyarakat dan meningkatnya cakupan layanan dan kualitas kesehatan masyarakat dalam rangka mewujudkan misi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dapat disimpulkan berhasil dengan **SANGAT BAIK**.

➤ **Misi IV : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**

**Tujuan : Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Efektif, Efisien dan Akuntabel**

**Tabel 3.3.4. Pencapaian Kinerja (Misi IV) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indicator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	CC	CC	100
	Peringkat Penilaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)	30 Besar	N/A	N/A
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	WDP	N/A	N/A
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	Baik	Baik	100

Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Pemerintah Daerah wajib menyusun dan

menyajikan laporan keuangan dan laporan kinerja. Evaluasi Laporan Kinerja Tahunan ditujukan untuk mengukur tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016, Kabupaten Blitar memperoleh predikat CC atau naik satu peringkat dibanding tahun sebelumnya. Predikat ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan berorientasi pada hasil di Pemerintah Kabupaten Blitar sudah cukup memadai, dengan masih ada beberapa perbaikan yang perlu dilakukan, diantaranya, publikasi dan updating Renstra, Indikator Kinerja Utama (IKU), Laporan Kinerja dan Perjanjian Kerja pada website Pemerintah Kabupaten Blitar dan/atau milik SKPD, penerapan anggaran berbasis kinerja, dan melakukan evaluasi program untuk memastikan setiap program dapat terukur dengan baik, dan lain-lain.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah selama satu tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). LPPD disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peringkat LPPD Kabupaten Blitar pada tahun 2015 adalah 36 sedangkan LPPD Tahun 2016 hingga saat ini belum dirilis oleh Kemendagri.

Opini Audit BPK merupakan salah satu tolok ukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis opini yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah, yaitu Opini Wajar Tanpa Pengecualian; Opini Wajar Dengan Pengecualian; Opini Tidak Wajar; dan Pernyataan Menolak Memberikan Opini. Opini Audit BPK pada tahun 2015 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP) sedangkan pada tahun 2016 pada saat penyusunan dokumen LKPJ, BPK sedang melaksanakan pemeriksaan rutin tahunan dan opini (LHP) akan disampaikan setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Beberapa hal yang telah dilaksanakan dalam rangka memperbaiki opini BPK terkait penyelesaian permasalahan asset yaitu:

- 1) Membentuk Tim Percepatan Penyelesaian Aset; dan
- 2) Membentuk Majelis Tim Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR).

Sedangkan terkait penyelesaian permasalahan aset, progress yang perlu dilaporkan yaitu Perjanjian Kerjasama antara Kabupaten Blitar dengan PT. Sinar Sukses Sentosa (Pabrik Tiwul Istan).

sedang dalam proses pengakhiran dimana pada tahun 2016 telah ditandatangani kesepakatan bersama oleh Bapak Bupati Blitar dan Direktur Utama Dewan Pengurus PT. Sinar Sukses Sentosa tentang Rencana Pengakhiran Kerjasama Operasional Pembangunan Pabrik Tiwul Istan di Blitar dan pada tahun 2016 Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah melaksanakan appraisal aset pada PT. Cahaya Sukses Sentosa. Penyelesaian permasalahan perumahan Jatilengger menunggu pembahasan di tingkat legislatif.

Sasaran Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik, Pada tahun 2016 Bagian Organisasi Sekretariat Daerah melaksanakan survey kepuasan masyarakat pada 5 SKPD, yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan (sample 5 puskesmas), Dinas Perhubungan dan Kominfo (pelayanan KIR), KPTSP, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (pelayanan surat pindah, pelayanan KTP, pelayanan KK, dan Pelayanan Akta). Dari 21 unsur yang disurvei, seluruhnya memiliki tingkat kepuasan Baik.

Keberhasilan capaian sasaran strategis diatas dilakukan dengan mengoptimalkan Program Kerja diantaranya; Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur, Program Peningkatan Efektivitas Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Perangkat Daerah, Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawasan, Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ kota, Program Perumusan Kebijakan Pengelolaan Asset Daerah, Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah. Serta Program dan Kegiatan lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam pencapaian sasaran.

Dari uraian serta capaian kinerja tahun 2016 atas sasaran Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan meningkatnya cakupan layanan dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dalam rangka mewujudkan misi Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dapat disimpulkan berhasil dengan **BAIK**.

➤ **Misi V : Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Masyarakat Yang Memiliki Daya Saing**

**Tujuan : Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dengan Penguatan Sistem Inovasi**

## Daerah (SIDa) dan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan

**Tabel 3.3.5. Pencapaian Kinerja (Misi V) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016**

Sasaran Strategis	Indicator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya Produktifitas Usaha Masyarakat, Koperasi, UMKM Berbasis Pertanian dan Pariwisata	Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB (%)	17,08	17,35 **)	101,58
	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB (%)	13,04	12,90 **)	98,92
	Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB (%)	35,75	35,41 **)	99,04
	Prosentase Peningkatan PAD dari Sektor Pariwisata (%)	1,25	1,14	91,2
Meningkatnya Pelayanan Perijinan	Predikat IKM Layanan Perijinan	Baik	Baik	100
Efektifnya Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan	Prosentase Ketaatan Terhadap RTRW (%)	100	100	100
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	66,7	66,87	100,25

Pada tahun 2016, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB sebesar 17,35 persen, dimana capaian ini melebihi target 17,08 persen. Pada tahun 2015, jumlah ekspor bersih perdagangan Kabupaten Blitar sebesar Rp. 936.000.000,- sedangkan pada pada tahun 2016 jumlah ekspor bersih perdagangan menjadi Rp. 1.255.000.000,- atau mengalami kenaikan sebesar 34,08% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Kabupaten Blitar relatif baik.

Pada tahun 2016, kontribusi sektor industri terhadap PDRB sebesar 12,90 persen, atau masih di bawah target yaitu sebesar 13,04 persen. Meskipun belum memenuhi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 12,96 % namun kontribusi sektor industri pengolahan tersebut telah berada pada jalur yang tepat. Pada tahun 2015, jumlah industri kecil Kabupaten Blitar sebesar 18.868 unit, sedangkan pada tahun 2016 jumlah industri kecil menjadi 20.759 unit, atau mengalami kenaikan sebesar 10,02%. Hal ini menunjukkan bahwa iklim usaha di Kabupaten Blitar sangat kondusif untuk tumbuhnya industri-industri baru.

Pada tahun 2016, kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB sebesar 35,14 persen atau lebih rendah 0,75 persen dibanding tahun 2015. Menurunnya kontribusi sektor pertanian ini sejalan dengan meningkatnya peran sektor sekunder pada tahun 2016 yang menandakan pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Blitar. Meskipun demikian, kinerja sektor pertanian pada tahun 2016 cukup baik. Dari sub sektor pertanian tanaman pangan, peningkatan produksi padi tahun 2016 sebesar 13,41 persen atau lebih tinggi dibanding peningkatan produksi padi tahun 2015 sebesar 3 persen. Produktivitas padi sawah juga mencapai target yaitu sebesar 64,37 kuintal per hektare. Sedangkan dari sub sektor peternakan, komoditas telur ayam masih menjadi andalan Kabupaten Blitar dengan memasok rata-rata produksi telur Jawa Timur sebesar 40 persen.

Persentase share sektor pariwisata terhadap PAD sebesar 1,14 persen atau masih dibawah target 1,2 persen. Meskipun demikian, PAD sektor pariwisata tahun 2016 sebesar Rp.2.549.656.000,00 atau meningkat 63,7 persen dari capaian tahun 2015 yang sebesar Rp. 1.557.115.000,00. Dinas Porbudpar mencatat kunjungan wisata di Kabupaten Blitar meningkat yaitu dari 1,560,015 (2015) menjadi 1,768,578 (2016) atau naik 13,4 persen.

Sasaran ini diukur melalui indikator Predikat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Perijinan. Sebagaimana hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perijinan yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi, dari 21 unsur pelayanan yang disurvei (diantaranya prosedur pelayanan, kecepatan petugas, keramahan petugas, kesesuaian alur, kejelasan prosedur pelayanan, dan lain-lain), seluruhnya memiliki predikat kepuasan Baik.

Ketaatan terhadap RTRW sebesar 100 persen artinya jumlah bangunan yang berizin telah sesuai dengan peruntukannya sebagaimana tertuang dalam Perda Kabupaten Blitar Nomor 5 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Blitar tahun 2011-2031.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kabupaten Blitar Tahun 2016 sebesar 66,87, atau lebih tinggi dibandingkan IKLH pada tahun 2015 sebesar 66,31. Dengan

nilai IKLH pada kisaran  $66 \leq x \leq 74$ , maka kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Blitar masuk kategori cukup baik. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup merupakan indeks komposit dari Indeks Pencemaran Air, Indeks Pencemaran Udara dan Indeks Tutupan Lahan.

Indeks Pencemaran Air digunakan untuk mengukur kualitas air sungai, nilai indeks ini pada tahun 2016 sebesar 70 (kategori cukup baik). Indeks Pencemaran Udara menggambarkan kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan pada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika dan makhluk hidup lainnya. Indeks Kualitas Udara di Kabupaten Blitar tahun 2016 adalah 95,69 termasuk kategori sedang. Artinya, tingkat kualitas udara tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan, tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang peka. Indeks Tutupan Lahan dihitung dengan menggunakan indikator luas wilayah (km<sup>2</sup>) dan luas tutupan hutan (km<sup>2</sup>). Indeks Tutupan Lahan Kabupaten Blitar pada tahun 2016 sebesar 42,90 atau naik 0,40 satuan dibanding tahun 2015 (42,5), artinya pengendalian lingkungan berjalan baik karena tidak hanya mempertahankan tetapi mampu menambah luas tutupan hutan di wilayah Kabupaten Blitar. Penanganan lahan kritis sepanjang tahun 2016 dapat dikatakan cukup berhasil. Dari data Dinas Lingkungan Hidup, penanganan lahan kritis pada tahun 2016 menghasilkan penurunan luas lahan kritis dari 6.479 Ha (2015) menjadi 6.364 Ha (2016) dan rehabilitasi hutan dan lahan kritis yang ditargetkan seluas 100 Ha pada 2016 mencapai 355 Ha.

Kebijakan yang diambil untuk mendukung sasaran Meningkatnya Produktifitas Usaha Masyarakat, Koperasi, UMKM Berbasis Pertanian dan Pariwisata antara lain:

- a. Kebijakan Bela dan Beli Produk Blitar
- b. Kebijakan pengembangan destinasi pariwisata.
- c. Kebijakan penambahan atraksi dan even wisata

Kebijakan yang diambil untuk mendukung sasaran Meningkatnya Pelayanan Perijinan antara lain :

- a. Kebijakan Pelayanan Perizinan *One Day Service*.
- b. Kebijakan Rintisan Perizinan Online.

Kebijakan yang diambil untuk mendukung sasaran Efektifnya Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan antara lain :

- a. Penyusunan Perda Tata Ruang yang mengatur tentang penetapan zona wilayah terbangun.
- b. Kebijakan PROKASIH (Program Kali Bersih).

- c. Kebijakan Bebas Sampah Kabupaten Blitar.
- d. Kebijakan Kabupaten Blitar Berseri ( Bersih, Sehat dan Lestari).

Selain itu juga dengan mengoptimalkan Program Kerja diantaranya; Program Pengembangan Usaha dan Lembaga Perdagangan, Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah, Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah, Program Peningkatan Produksi Pertanian/ perkebunan, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ perkebunan, Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial, Program pengembangan Pemasaran Pariwisata, Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup, Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam. Serta Program dan Kegiatan lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam pencapaian sasaran.

Dari uraian serta capaian kinerja tahun 2016 atas sasaran Meningkatkan Produktifitas Usaha Masyarakat, Koperasi, UMKM Berbasis Pertanian dan Pariwisata, Meningkatkan Pelayanan Perijinan dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik serta Efektifnya Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan dalam rangka mewujudkan misi Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Masyarakat Yang Memiliki Daya Saing dapat disimpulkan berhasil dengan **BAIK**.

➤ **Misi VI : Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan**

**Tujuan : Meningkatkan Kemandirian Desa**

**Tabel 3.3.6. Pencapaian Kinerja (Misi VI) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016**

<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indicator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian (%)</b>
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa	Prosentase Desa Tertinggal (%)	20,45	22,7	111 %

Sasaran ini diukur dengan indikator persentase desa tertinggal, dimana pada tahun 2016 sebesar 22,7 persen desa (50 desa) termasuk kategori desa tertinggal. Pada tahun 2016,

berdasar klasifikasi status desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

di Kabupaten Blitar terdapat 2 desa mandiri, 36 desa maju, 132 desa berkembang dan 50 desa tertinggal. Adapun desa yang sudah masuk kategori mandiri yaitu Desa Selopuro dan Desa Kesamben. Pada tahun 2015-2016 desa masih dalam tahap penataan kelembagaan dan penyiapan kapasitas sumber daya manusia, sehingga dampak penggunaan alokasi dana desa dan dana desa belum dapat terlihat secara signifikan. Selama kurun waktu 2015-2016, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta SKPD terkait lainnya telah melaksanakan berbagai program/kegiatan yang mendukung penyiapan kelembagaan dan kapasitas aparatur desa agar penggunaan dana desa dapat lebih optimal dan mampu dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif. Kegiatan-kegiatan tersebut diantaranya, bimbingan teknis penyusunan RPJMDes, bimbingan teknis review RPJMDes, bimbingan teknis penyusunan APBDDes, fasilitasi layanan pengadaan bagi desa-desa oleh ULP, sosialisasi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa, dan lain-lain. Diharapkan dengan kelembagaan yang baik dan sumber daya aparatur desa yang berkompeten, penggunaan dana desa maupun alokasi dana desa dapat berjalan efektif, efisien dan akuntabel sehingga mampu membawa kemajuan desa.

Kebijakan yang diambil untuk mendukung sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa antara lain:

- a. Kebijakan Optimalisasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa
- b. Optimalisasi kekayaan dan Pendapatan Desa

Keberhasilan capaian sasaran strategis diatas dilakukan dengan mengoptimalkan Program Kerja diantaranya; Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan, Program Pengembangan Ekonomi Pedesaan. Serta Program dan Kegiatan lain yang secara langsung maupun tidak langsung berkontribusi dalam pencapaian sasaran.

Dari uraian serta capaian kinerja tahun 2016 atas sasaran Meningkatnya Kualitas Pembangunan Desa dalam rangka mewujudkan misi Meningkatkan Pembangunan Berbasis Desa dan Kawasan Perdesaan dapat disimpulkan berhasil dengan **BAIK**.



# 4

## PENUTUP

---

### 4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Blitar disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021, dokumen RKPD 2016, Review IKU Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016 serta Perubahan Perjanjian Kinerja 2016. Dalam laporan ini mengukur kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar yang terdiri atas 6 Misi dan 11 sasaran. Berdasarkan analisis kinerja dapat disimpulkan bahwa sasaran-sasaran pada tiap-tiap Misi pada RPJMD dikategorikan **Baik**. Capaian Kinerja tiap-tiap sasaran diuraikan sebagai berikut :

1. Sasaran Menurunnya Angka Kemiskinan berhasil tercapai dengan **BAIK**.
2. Sasaran Meningkatnya Cakupan dan Kualitas Layanan Infrastruktur berhasil tercapai dengan **BAIK**.
3. Sasaran Terwujudnya Stabilitas Wilayah berhasil tercapai dengan **BAIK**.
4. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pendidikan Masyarakat berhasil tercapai dengan **SANGAT BAIK**.
5. Sasaran Meningkatnya Cakupan Layanan dan Kualitas Kesehatan Masyarakat berhasil tercapai dengan **BAIK**.
6. Sasaran Meningkatnya Efektifitas dan Efisiensi Serta Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah berhasil tercapai dengan **BAIK**.
7. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik berhasil tercapai dengan **BAIK**.
8. Sasaran Meningkatnya Produktifitas Usaha Masyarakat, Koperasi, UMKM Berbasis Pertanian dan Pariwisata berhasil tercapai dengan **BAIK**.
9. Sasaran Meningkatnya Pelayanan Perijinan berhasil tercapai dengan **BAIK**.

10. Sasaran Efektifnya Pemanfaatan Ruang dan Lingkungan berhasil tercapai dengan **SANGAT BAIK.**

11. Sasaran Meningkatkan Kualitas Pembangunan Desa berhasil tercapai dengan **BAIK.**

#### **4.2. LANGKAH PERBAIKAN**

Langkah-langkah kedepan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja akan dilakukan hal-hal sebagai berikut :

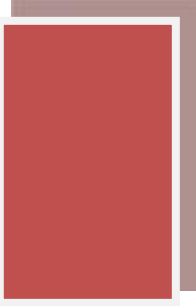
1. Review RPJMD
2. Review Renstra OPD
3. Penyusunan RKPD 2018
4. Sinkronisasi dan Harmonisasi Program dan Kegiatan disesuaikan dengan program prioritas mengacu kepada Visi dan Misi Bupati.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2016 yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap sasaran dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Blitar.

Blitar, 30 Maret 2017

**BUPATI BLITAR**

**Drs. RIJANTO, MM**



## *Lampiran*

---

- 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Blitar**
- 2. Matrik RPJMD Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021**
- 3. Matrik Pengukuran Kinerja Tahun 2016 Pemerintah Kabupaten Blitar**
- 4. Pernyataan Telah Direviu dari Inspektorat**
- 5. Prestasi dan Penghargaan yang diterima Kabupaten Blitar**



## Prestasi Kabupaten Blitar

NO	NAMA LOMBA	PRESTASI (Juara Tingkat)	PESERTA/NAMA PESERTA	ALAM
1	KB MKEJ dalam rangka Hari Bhayangkara	Juara II Tk. Propinsi	Atas Nama Polres Kabupaten	Kab. Blitar
	Lomba Duta Mahasiswa	Harapan I Putra Tk. Propinsi	Wisda Kukuh Aly Fahat	Kab. Blitar
	Lomba Vidio Klip Lansia Tangguh	Juara Tk. I Propinsi	Hj. Sulamah	Kab. Blitar
	Anugrah APE	<b>Nasional</b>	Pemerintah Daerah	Kab. Blitar
	Lomba Kader BKB Kec. Doko	Juara III Tk. Prop. Jatim	Wisda Kukuh	STIKES Blitar
2	Target Nasional Cakupan Kepemilikan akte Kelahiran Tahun 2016	<b>Piagam Penghargaan dari Mendagri</b>	Dinas Pendidikan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar	Jl.Sudanco Supr
3	Evaluasi POKMASWAS	Juara II Tk. Propinsi	POKMASWAS" Fajar Bengawan"	Ds. Tambakrejo Binangun
4	Lomba PLBK	Juara Harapan II Tk. Prop Jatim	BKM HARAPAN MAKMUR	Ds. Sawentar Ke Kab. Blitar
5	Lomba Desa Tangguh	Terbaik Tk. Prop. di Bidang Partisipasi Kategori Pratama	Ds. Karangrejo Kec. Garum Kab. Blitar	Ds. Karangrejo K Kab. Blitar
6	National Procurement Award	<b>National</b>	LPSE Kab. Blitar	Jl.Raya Dandong
7	Wahana tata Nugraha	<b>National</b>	Kabupaten Wlingi Kab. Blitar	Kec. Wlingi Kab.
8	PPID	tingkat Propinsi	Sistem pelayanan terbaik Kategori A	Jln.Raya Dandong
9	Lomba Kinerja LPMD/K tingkat Prop. Jatim	Juara III Tk. Prop. Jatim	LPMD Desa Pasirharjo	Desa Pasirharjo Kab. Blitar
10	Lomba Pasar Desa	8 Besar Tingkat Jatim	Pasar Desa Sumberingin	Kec. Sanankulon
11	Seleksi Bumdes terbaik Tingkat Nasional	Bumdes terbaik Tingkat Nasional Katagori Rintisan Eco Agriculture	Bumdes Maju Makmur Minggirsari	Ds. Minggirsari Kanigoro Kab. B
12	Pembina K3 Terbaik	Propinsi	Drs. Rijanto, MM (Bupati Blitar	Jl. Semeru no. 4
13	Penghargaan Kecelakaan Nihil	Propinsi	CV. RICH0 REFRACTORY	Jl. Raya Kendalrejo Kec. Blitar
			Rumah Sakit Umum An-Nisaa'	Jl. Suparyono Ti Kec. Talun Kab.

			Perkebunan Petungombo	Ds. Karangrejo K Kab. Blitar
			PT. Perkebunan & Dagang Gambar	Ds. Sumpersari Nglegok kab. Blitar
			PT. Perkebunan & Perdagangan Rojobrono Perkebunan Kawisari	Kec. Wlingi Kab.
			BPR Nusamba	Kec. Wlingi Kab.
			PT. Triwindu Perkebunan pjiombo	Ds. Ngadirenggo Kab. Blitar
			PT. Blitar Putra Perkebunan Kopi "Ngusri"	Ds. Gadungan k Gandusari Kab.
			PT. Perkebunan Tjengkeh Kebun Branggha Banaran	Ds. Sidorejo Kec Blitar
			CV. Damai Indah Lestari	Ds. Tingal Kec. C Blitar
			PTPN XII (Persero) Kebun Bantaran	Ds. Tulungrejo k Gandusari Kab.
			Perusahaan Daerah Air Minum	Jl. Gajah Mada n Wlingi Kab. Blitar
			PT. Perkebunan & Perdagangan Dewi Sri Perkebunan Sengon	Ds. Ngadirenggo Kab. Blitar
			UD. Cemara Putra	Lingkungan Mu 01 RW. 01 Kec. Blitar
			Rumah Sakit Umum Aulia	Jl. Raya Utara n Kembangarum Kec. Sutojayan K
			PT. Jatinom Indah Agry	Ds. Minggirsari K Kanigoro Kab. B
			PT. Tjandi Sewu Baru	Ds. Penataran K Kab. Blitar
			KSU. Sri Lestari	Ds. Sukorjo Kec. Kab. Blitar
14	Sertifikasi Paripurna Rumah Sakit Ngudi Waluyo	<b>Nasional</b>	RSUD Wlingi	Kec. Wlingi Kab.
15	JUARA I Pelayanan Ketahanan Pangan	tingkat Propinsi	Kategori Pengendalian OPT	IMAM HARSANA DOKO
16	JUARA II Pelopor Ketahanan pangan	tingkat Propinsi	Kategori Pemangku	Andrias Kapila, I
17	JUARA III Pelaku Ketahanan Pangan	tingkat Propinsi	Kategori Poktan/Gapoktan	Paguyuban Sari Selopuro
18	Duta Genre (Kategori Putri)	Vinalis tingkat Propinsi Jatim	Dina	BPPKB Kab. Blita

19	Stand Up Comedy Kependudukan	Nominator 10 besar tingkat Prop Jatim	BPPKB Kab. Blitar	BPPKB Kab. Blita
20	Kelompok UPPPKS	10 besar tingkat Jatim	BPPKB Kab. Blitar	BPPKB Kab. Blita
21	Festival Olahraga Tradisional	Juara 3 Dagongan tingkat Jatim	Afina Anggraeni Putri dkk	SMAN Sutojaya
22	Festival Musik Tradisional	<b>Penata Musik Terbaik Tingkat Nasional</b>	Mewakili Kab. Blitar di Prov Jatim	Kab. Blitar
23	Festival Karya Tari	tingkat Propinsi Jatim	3 Penyaji Terbaik tanpa Jenjang	Pemkab Blitar
24	Majapahit Travel Fair	<b>Pemenang kedua stand terbaik kategori stand terkecil se Indonesia Timur</b>	Pemkab Blitar	Kab. Blitar
25	Pemuda Pelopor Bidang Pendidikan	Juara I tingkat Prop Jatim	Andris Prasetyo	Sanankulon
26	Pemuda Pelopor Bidang Inovasi Teknologi	Juara tingkat II Prov Jatim	Wahyu Purnomo	Karangrejo, Kec
27	Pusat Pelatihan Pedesaan Swadasa (PUS) Berprestasi	<b>Juara III Tk. Nasional</b>	Binaan BP4K	Kab. Blitar
28	Penyuluh Pertanian Swadaya Berprestasi	Tingkat prov Jatim	Sarwi	Kec. Sutojayan
29	Pusat Pelatihan Pedesaan Swadasa (P4S) Berprestasi	<b>Juara III nasional</b>	P4S Gogoniti, a.n. Mukarom Salasa	Desa Kemiri Ged kesamben
30	Karang Wreda Berprestasi	Juara I tingkat Prop Jatim	Karang Wreda Mulyo Raharjo	Desa Karangson Kanigoro
31	Desa/Kelurahan Berseri	Tingkat prov Jatim	Desa Jatinom	Kecamatan Kani
32	Desa/Kelurahan Berseri	Tingkat prov Jatim	Kelurahan Tangkil	Wlingi
33	Sekolah Adiwiyata	Tingkat prov Jatim	MIN Sukosewu	Kec. Gandusari
34	kelurahan/Desa Tangguh	Terbaik tingkat Jatim	Desa Karangrejo	Kec. Garum



Piala dan Penghargaan Wahana Tata Nugraha Tahun 2016 Kabupaten Blitar



Juara 1 Stand Terbaik Pada pameran di Banjarmasin



Piagam Penghargaan Bidang K3  
(Keamanan, Keselamatan & kesehatan) kerja



Penghargaan Badan Publik dengan Layanan Informasi Terbaik (A) dan  
Badan Publik dengan Website Terinformatif Tingkat Kabupaten/Kota  
Provinsi Jawa Timur

